

Date Received : June 2024
Date Revised : July 2024
Date Accepted : July 2024
Date Published : August 2024

KEPALA SEKOLAH SEBAGAI AGEN MEDIASI DALAM REFORMASI PENDIDIKAN DI MAN 3 MEDAN

Adinda Suci Yandhani¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (adindasuciyandhani@uinsu.ac.id)

Amiruddin Siahaan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (amiruddin.siahaan@uinsu.ac.id)

Inom Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia (inomnasution@uinsu.ac.id)

Kata Kunci:

Kepala sekolah,
reformasi
pendidikan, agen
perantara

ABSTRACT

Kepala sekolah sebagai agen mediasi berperan menjadi untuk memediasi antara tuntutan kebijakan reformasi terhadap sikap dan kebutuhan guru. Reformasi pendidikan dapat dicirikan oleh dua ciri yang berbeda: terencana dan sistemik. Dalam hal ini Kepala Sekolah menggunakan strategi antara mendapatkan dukungan guru terhadap reformasi atau menyesuaikan reformasi terhadap sikap dan kebutuhannya. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan temuan analisis sumber data, dapat disimpulkan bahwa strategi mediasi dapat diterapkan baik secara internal maupun eksternal di lembaga pendidikan. Proses mediasi terdiri dari dua tahap yang berbeda: mediasi sektoral dan mediasi lintas sektoral. Temuan dari analisis data mengungkapkan bahwa (1) kebijakan kepala sekolah mengenai reformasi Pendidikan, (2) peran kepala sekolah sebagai agen mediasi kurikulum reformasi pendidikan, (3) tantangan kepala sekolah dalam memediasi kurikulum dengan menyesuaikan sikap dan kebutuhan guru

Keywords:

School principals,
education reform,
intermediary agents

ABSTRACTS

The principal as a mediation agent plays a role in mediating between the demands of reform policies against the attitudes and needs of teachers. Educational reform can be characterized by two distinct characteristics: planned and systemic. In this case, the Principal uses a strategy between getting teachers' support for reform or adjusting reforms to their attitudes and needs. Based on the findings of the analysis of data sources, it can be concluded that mediation strategies can be applied both internally and externally in educational institutions. The mediation process consists of two different stages: sectoral mediation and cross-sectoral mediation. The findings of the data analysis revealed that (1) the principal's policy regarding education reform, (2) the role of the principal as a mediation agent for the curriculum of education reform, (3) the challenge of the principal in mediating the curriculum by adjusting the attitude and needs of teachers

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Reformasi merupakan ciri menonjol dari sistem pendidikan saat ini, yang dirancang untuk menjamin bahwa setiap anak mempunyai akses yang adil terhadap pendidikan dengan kualitas luar biasa, bersamaan dengan keyakinan bahwa kekuatan masyarakat dan ekonomi terkait erat dengan kekuatan sistem sekolah, memotivasi banyak Lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi di Lembaga Pendidikan masing-masing. Kementrian pendidikan, kebudayaan dan ristek memiliki tujuan untuk hal ini agar dengan menerapkan kebijakan pembelajaran otonom, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat dilakukan melalui reformasi sistem pendidikan (Makarim, 2021).

Aspek yang mencakup reformasi dalam pendidikan termasuk kurikulum, metode pengajaran, manajemen sekolah, dan pelatihan guru. Semua aspek merupakan proses yang upaya ini rumit dan memerlukan dukungan kuat dari banyak pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dan substansial dalam sistem pendidikan. Gerakan Reformasi Pendidikan Global (GERM) memperkenalkan lima pilar reformasi pendidikan untuk membawa perubahan di sektor pendidikan. Pilar-pilar tersebut meliputi standardisasi, fokus pada mata pelajaran inti seperti literasi dan numerasi, penggunaan metode berisiko rendah untuk mencapai tujuan pendidikan, penerapan model manajemen korporat dalam manajemen pendidikan, dan penerapan akuntabilitas eksternal melalui tes terstandar.

Berbagai reformasi pendidikan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dalam sistem sekolah, termasuk kualitas pendidikan yang tidak memadai, kesenjangan pendidikan, dan terbatasnya akses, relevansi kurikulum, dan sebagainya. Salah satu aspek terpenting seharusnya adalah kepemimpinan sekolah (Spillane & Kenney, 2012). Meskipun hal selain itu dikategorikan penting tetapi beberapa hal masih sering terabaikan untuk aspek lain di sekolah yang bisa berpotensi penting dalam memahami implementasi reformasi pendidikan.

Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kohesi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjamin pemerataan kesempatan bagi warga negara untuk terlibat dalam pembangunan, dan memberdayakan setiap individu untuk mengembangkan kemampuannya sendiri (Dananjaya, 2012). Hal ini menjadi insentif yang kuat bagi individu dari semua sektor masyarakat untuk berkontribusi terhadap kemajuan dan kemajuan sistem pendidikan bangsa. Interaksi antara pendidikan dan masyarakat memberikan jalan bagi kemajuan bangsa. Perkembangan suatu bangsa pada umumnya diyakini sangat erat kaitannya dengan kemajuan pendidikan. “Negara yang pendidikannya tidak memadai tidak akan maju” (SBY, Kompas 2013). Pendidikan akan maju dengan dukungan semua sektor masyarakat, termasuk orang tua.

Menurut KBBI, reformasi diartikan sebagai transformasi radikal yang bertujuan untuk meningkatkan aspek sosial, politik, dan/atau agama suatu masyarakat atau negara (Poerwadarminta, 2007). Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa landasan reformasi berakar pada persyaratan yang akan datang, memperkuat struktur awal, mengupayakan perbaikan dengan menghentikan berbagai penyimpangan dan praktik yang salah, dan selanjutnya menerapkan protokol yang lebih unggul (Zainuddin, 2008). Selain itu, reformasi memerlukan transformasi struktur masyarakat secara menyeluruh dan menyeluruh dalam berbagai dimensi, termasuk bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan pendidikan. Pada akhirnya, reformasi

pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan, memvalidasi, dan menyempurnakan aspek-aspek sistem pendidikan yang dianggap tidak sesuai, dengan tujuan memberikan manfaat bagi pendidikan di masa depan. Misalnya saja dengan menerapkan modifikasi pada kebijakan dan institusi pendidikan.

Reformasi pendidikan dapat dicirikan oleh dua aspek mendasar: kemampuan program dan sistemisasi. Artinya, reformasi pendidikan yang terprogram dapat dibuktikan dengan hadirnya kurikulum atau program dalam suatu lembaga pendidikan yang mencerminkan esensi inovasinya. Tindakan memberikan ide-ide baru, pendekatan inovatif, atau sumber daya baru untuk meningkatkan banyak bidang proses pendidikan, sehingga menghasilkan transformasi yang signifikan (Zainuddin, 2008). Modifikasi kurikulum yang dilakukan setiap tahun menunjukkan upaya berkelanjutan untuk merevisi program pendidikan dan membangun sistem pendidikan yang optimal. Reformasi sistemik berkaitan dengan interaksi antara otoritas, alokasi sumber daya, dan distribusi yang mengatur keseluruhan sistem pendidikan. Hal ini sering terjadi di luar lingkungan pendidikan dan dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik. Mengingat kondisi bangsa saat ini, mencapai reformasi sistemik merupakan suatu tantangan karena struktur kekuasaan yang kompleks, khususnya sistem pendidikan yang terpusat yang menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini termasuk penyelenggaraan ujian nasional dan pemerataan pendidikan, yang merupakan masalah sensitif bagi masyarakat karena adanya pendanaan.

Penerapan reformasi Pendidikan tidak lepas dari peran kepala sekolah sebagai mediator dalam mewujudkan kurikulum yang lebih baik dari segi pemilihan tujuan, isi dan metode pengajaran, bekerja sama dengan wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Inisiatif sebagai pemimpin untuk melakukan perubahan dengan berbagai upaya sistematis yang telah banyak demi keberhasilan tujuan bersama. Kepala sekolah juga harus mampu memimpin lembaga pendidikan dan mengidentifikasi serta memecahkan permasalahan (Hamid, 2018). Tanggung jawab seorang administrator sekolah memiliki label harga yang mahal. Sebagai kepala sekolah harus mampu menjalankan peran sebagai pemimpin pendidikan untuk mengedepankan toleransi di kalangan guru dan menjunjung etika (Amiruddin, 2021). Salah satu aspek penerapan adalah dengan meningkatkan kualitas keberhasilan sekolah, kepala sekolah harus mampu menangani segala permasalahan yang ada.

Pemimpin sekolah yang paling efektif terus-menerus mencari cara baru untuk meningkatkan standar kurikulum pembelajaran siswa sehingga keberhasilan reformasi kurikulum bergantung pada kemampuan melibatkan orang-orang yang mau untuk paham bersama, untuk bisa terlibat dalam pemahaman bersama diatur oleh strategis praktis yang digunakan untuk membangun upaya reformasi dan pembangunan yang diperlukan.

Terdapat empat variabel berpengaruh yang sering menyebabkan terjadinya modifikasi kurikulum, yaitu: Pertama, adanya permasalahan yang bersumber dari birokrasi, sehingga mengakibatkan para birokrat memiliki ekspektasi dan sikap yang berlebihan terhadap tujuan kurikulum. Selain itu, terdapat pula variabel-variabel yang muncul dari proses penyusunan kurikulum, khususnya akibat belum memadainya landasan filosofis dan psikologis dalam pengembangan program kurikulum. Selain itu, rendahnya tingkat kompetensi dan profesionalisme guru menghambat efektivitas implementasi kurikulum. Lebih lanjut, ekosistem pendidikan dipengaruhi oleh

berbagai variabel, seperti kurangnya dukungan sosial dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai (Surakhmad, 2009). Menurut Surakhmad, keempat kekuatan ini saling berhubungan dan secara konsisten bekerja sama sebagai suatu kombinasi yang menjamin kegagalan dan perubahan. Memang benar, perubahan kurikulum yang dilaksanakan sebagai bagian dari reformasi pendidikan sangat berkorelasi dengan individu yang terlibat dan birokrasi pendidikan.

Penting bagi kita untuk memulai modifikasi yang sesuai dalam sudut pandang, pemahaman, dan pendekatan rencana pendidikan kita sebagai respons terhadap empat aspek yang berkontribusi terhadap reformasi kurikulum berkelanjutan. Penyesuaian ini akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Berikut ini dapat dirumuskan perubahan cara pandang, konsepsi, dan strategi kurikulum;

1. Memastikan bahwa instruktur diposisikan di lokasi terpusat, menghargai independensi mereka, dan menawarkan bantuan komprehensif untuk memungkinkan guru mencapai tingkat keberhasilan tertinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk memposisikan kurikulum sebagai pelengkap kualitas profesional, bukan sebagai kumpulan peraturan yang mendikte profesionalisme guru.
2. Membuat program kurikulum dengan mempertimbangkan landasan filosofis, pedagogi, psikologis, sosial budaya, teknis, dan politik sebagai elemen dasar kurikulum. Selain itu, pastikan program mencerminkan keadaan aktual di masyarakat dan bidang pendidikan.
3. Memungkinkan guru untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor mendasar yang terlibat dalam pengembangan kurikulum baru, secara aktif melibatkan guru dalam melakukan penelitian, eksperimen, dan evaluasi berbagai bidang kurikulum. Selain itu, hal ini secara konsisten memungkinkan guru untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka sebagai ahli kurikulum.
4. Memunculkan dukungan dan ketakutan dari masyarakat, khususnya orang tua dan pemangku kepentingan lainnya, terhadap inisiatif pendidikan, sekaligus memenuhi semua persyaratan untuk menjamin prestasi dan meningkatkan keunggulan.

Selain keempat reformasi tersebut di atas, perlu ditetapkan kebijakan kolaboratif yang bertujuan untuk mengefektifkan dan memperjelas pemahaman guru, orang tua, dan pemangku kepentingan terhadap kurikulum pendidikan, seperti yang diutarakan Surakhmad. Kebijakan ini akan mencakup berbagai aspek pemahaman:

1. Kurikulum tidak lagi dianggap sebagai metode reformasi yang lebih penting dibandingkan guru. Sebaliknya, guru kini dipandang sebagai agen utama yang bertanggung jawab menerapkan kurikulum.
2. Kurikulum tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan dan informasi yang sah dan pasti, sehingga pilihan pembelajaran tambahan yang mungkin lebih relevan menjadi usang.

Kurikulum tidak lagi diwajibkan untuk seragam dan berlaku untuk semua, sehingga menghambat potensi pertumbuhan daerah dalam konteks desentralisasi pendidikan, serta penciptaan program pendidikan khusus daerah.

B. METODE

Berdasarkan kerangka teoritis yang diuraikan diatas menggunakan pendekatan kualitatif, mengeksplorasi bagaimana kepala sekolah memediasi antara tuntutan kebijakan eksternal dan sikap dan kebutuhan guru selama pelaksanaan reformasi pendidikan nasional. Peneliti memilih 5 partisipan yang berpartisipasi (2 orang laki-laki, 3 orang Perempuan) yang diwakilkan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang hubungan Masyarakat (HUMAS), dan 2 orang guru mata Pelajaran. Data dikumpulkan selama lebih kurang 3 bulan melalui wawancara semi terstruktur yang dirancang untuk mengeksplorasi perspektif pribadi peserta (Rossmann dan Rallis, 2012). Kepala sekolah diminta untuk merefleksikan secara perspektif bagaimana peran mereka selama pelaksanaan reformasi pendidikan nasional, melalui pertanyaan-pertanyaan seperti: “Apa arti reformasi dalam peran Anda sebagai kepala sekolah?”; “Faktor-faktor apa yang mendorong atau menghambat pelaksanaan reformasi?”; “Sepanjang proses implementasi reformasi, faktor-faktor apa saja yang secara signifikan mempengaruhi keputusan Anda?” Wawancara individu dengan kepala sekolah dan partisipan lainnya berlangsung selama satu jam.

Pengumpulan dan analisis data dilakukan bersamaan dalam proses berkelanjutan selama penelitian, dengan proses analisis ada empat tahap - kondensasi, pengkodean, kategorisasi, dan teori. Setelah data dikumpulkan, peneliti menemukan bahwa tidak semuanya dapat melayani tujuan penelitian, dan perlu disortir (Miles, Huberman, dan Saldaña2014). Pada analisis tahap pertama (kondensasi) peneliti mencari bagian-bagian data yang berkaitan dengan peran kepala sekolah, karena itu topik penelitiannya. Pada tahap kedua (coding) setiap segmen data yang relevan (ucapan) diberi kode sesuai dengan aspek peran kepala sekolah yang diwakilinya (Tracy2013). Kemudian tahap selanjutnya mengolah kembali definisi-definisi ini untuk merekonsiliasi data yang tidak mendukung dengan analisis yang muncul (Richards dan Morse, 2013). Dengan demikian, dimensi kategori dieksplorasi, mengujinya terhadap keseluruhan data dan mengidentifikasi. Tahap keempat adalah berteori, tujuan untuk melampaui kategori-kategori dan mencapai konstruksi konseptual terpadu (Richards dan Morse2013), peneliti melakukan konsolidasi kategori-kategori yang dibentuk pada tahap sebelumnya dengan berbagai cara, hingga kami menyadari bagaimana komponen-komponen yang berbeda saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain sebagai bagian dari keseluruhan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan memiliki esensi transformatif, berpikiran maju, dan remedial. Pendidikan harus memiliki kemampuan untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Reformasi pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki, merasionalisasi, dan meningkatkan aspek-aspek sistem pendidikan yang dianggap tidak sesuai, dengan tujuan akhir untuk memperbaiki pendidikan di masa depan. Misalnya saja dengan menerapkan modifikasi pada kebijakan dan institusi pendidikan.

Kepala sekolah, sebagai pemimpin di lembaga pendidikan, mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang lebih dari sekedar kepemimpinan dan manajemen tapi juga harus mampu mengayomi, megarahkan dan menyampaikan segala kebijakan serta

melibatkan seluruh anggota yang ada di lingkungan sekolah baik intra maupun ekstra dalam melaksanakan reformasi Pendidikan yang ada.

Cara Kepala Sekolah Menyampaikan Kebijakan Reformasi Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berdedikasi untuk meningkatkan kualitas dan penerapan pendidikan di Indonesia dengan menerapkan langkah-langkah transformatif yang komprehensif. Di era merdeka belajar, penekanan utama pada inovasi kurikulum, pemberdayaan guru, dan integrasi teknologi di dalam kelas menjadi landasan utama dalam upaya menjamin setiap individu mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu (Jakarta, Irjen Dirjen Pol) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

Salah satu upaya yang penting adalah membekali kepala sekolah dengan kurikulum yang disederhanakan. Menurut Mendikbudristek (2023), sekolah yang menggunakan kurikulum yang tidak terlalu rumit menemui hambatan dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, Direktur Badan Standar Kurikulum dan Penilaian Pendidikan (BSKAP) menekankan pentingnya korelasi antara hasil Program for International Student Assessment (PISA) dengan Asesmen Nasional di Indonesia. Asesmen Nasional memberikan gambaran yang lebih rinci tentang masing-masing sekolah di Indonesia, menyediakan data penting untuk tujuan menyusun strategi dan meningkatkan proses pembelajaran (Anindito Aditomo, 2023).

Berangkat dari hal di atas merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat mengenai reformasi pendidikan, dan menjadi salah satu tugas kepala sekolah untuk menyampaikan kepada masyarakat sekolah baik guru dan tenaga pendidik, bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam menyampaikan transformasi pendidikan Indonesia yang dibuat oleh pemerintah kepada guru-guru, tenaga pendidik dan masyarakat sekolah.

Ungkapan bapak kepala sekolah mengenai reformasi Pendidikan saat ini, mengatakan kebijakan reformasi pendidikan itu dasarnya dari pemerintah atasan, ketika kebijakan reformasi ada itu langsung saya pahami dan mengusahakan untuk sampai kepada para guru dan tenaga pendidik tentang reformasi ini saya pastikan dulu bagaimana komunikasi yang saya lakukan buat menjelaskan hal ini itu bisa nyama dan tidak membuat guru-guru merasa berat dan tertekan, sehingga tujuan dari kebijakan saya ini bisa terealisasikan nanti nya (Hasan, 2024).

Bapak wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga saat saya wawancarai menyampaikan bahwa kepala sekolah melakukan penyampaian kebijakan mengenai reformasi Pendidikan dengan menggunakan strategi seperti memberi dukungan mengenai kebijakan reformasi, menggunakan komunikasi yg baik dengan guru, karena semakin bagus dan terjalin nya komunikasi yg baik sangat penting dalam kehidupan di sekolah dan merupakan alat yang paling sering digunakan oleh pimpinan dalam menyampaikan sesuatu (Anas, 2024).

Peran pemimpin memerlukan penggunaan komunikasi untuk mengembangkan makna bersama dan menciptakan visi untuk meningkatkan masa depan organisasi dan membimbingnya melalui masa perubahan (Helmer, Hot dan Thompson 2015). Dengan demikian, salah satu cara yang digunakan kepala sekolah yang efektif dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya adalah berkomunikasi (Porter. 2008). Selama pelaksanaan reformasi pendidikan nasional, diharapkan kepala sekolah

berkomunikasi dengan guru dalam berbagai cara dan kesempatan untuk mengurangi penolakan dan mendapatkan dukungan mereka terhadap reformasi.

Peran Kepala Sekolah Sebagai Agen Mediasi dalam Melaksanakan Reformasi Kurikulum

Pelaksanaan reformasi nasional, tidak semua sekolah diwajibkan untuk mengadopsi reformasi tersebut. Dengan memanfaatkan kebijakan implementasi bertahap untuk mendapatkan dukungan guru terhadap pelaksanaan reformasi. Pengalaman kepemimpinan kepala sekolah saat ini ia menggambarkan proses persuasi mengenai reformasi dan mencoba menjelaskan kepada para guru bahwa reformasi itu bermanfaat bagi mereka.

Reformasi pendidikan mengacu pada upaya pemerintah untuk meningkatkan dan memajukan sistem pendidikan. Setiap perubahan kurikulum bertujuan untuk menyempurnakan sistem pendidikan. Artinya, kurikulum baru bertanggung jawab untuk memodernisasi, menyempurnakan, dan menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Namun demikian, reformasi kurikulum seringkali menimbulkan permasalahan di masyarakat, yang berdampak baik pada komunitas sekolah maupun masyarakat umum. Permasalahan yang muncul sehubungan dengan penyesuaian kurikulum berkaitan dengan penerapannya dan alasan yang mendasari perubahan tersebut. Reformasi kurikulum telah secara signifikan mengubah struktur dan rangkaian kegiatan pendidikan di sekolah.

Peran saya dalam memediasi proses bergabung dengan reformasi ini seperti meyakinkan para guru tentang reformasi ini akan layak dan cocok untuk mereka. Saya melakukan rapat pertemuan antara staf dan guru untuk meyakinkan mereka bahwa reformasi ini akan membantu memenuhi kebutuhan mereka, dan saya bahkan juga bertanya kepada para guru siapa yang siap dengan reformasi dan siapa yang tidak siap, dan kebanyakan dari mereka menjawab siap untuk melakukannya. Itulan cara saya meyakinkan mereka dengan lebih mudah bahwa reformasi tidak seburuk itu, peran penting dalam hal ini adalah meyakinkan agar proses ke depannya bisa sejalan, seperti itu peran mediasi saya dalam pelaksanaan yang akan berjalan (Hasan, 2024).

Meskipun kepala sekolah juga bisa aja mengambil keputusan sendiri, tetapi ia ingin keputusan ini di setujui juga oleh para guru agar sama-sama merasa enak,nyaman. Penerapan kebijakan yang dilakukan pimpinan kepala sekolah kami ini baik seperti bertahap, sehingga tidak langsung memutuskan sendirian. Ini bukan hal yang tidak sulit untuk menghadapi tantangan reformasi Pendidikan, khususnya pada bidang kurikulum, banyak hal yang harus disiapkan, jika dari awal guru-guru tidak merasa nyaman dengan cara kepala sekolah bagaimana untuk menjalani yang selanjutnya (Ifroh, 2024).

Kurikulum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan sebagai kerangka untuk menyelenggarakan pendidikan di berbagai tingkatan. Menurut pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mutu pendidikan dan pembelajaran perlu disesuaikan dengan standar proses yang berlaku saat ini. Salah satu kriteria yang perlu ditetapkan adalah standar proses, yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan untuk mencapai kompetensi. Standar proses tersebut menetapkan persyaratan penting bagi proses pendidikan di lembaga pendidikan dasar dan menengah, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 41 Tahun 2007 (Punaji Setyosari, 2014).

Standar proses mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan pemantauan proses pembelajaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.

Tantangan Kepala Sekolah dalam Memediasi Kurikulum dengan Menyesuaikan Sikap dan Kebutuhan Guru.

Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka dari perspektif sekolah dari segi Manajemen Sekolah, kepala sekolah perlu memainkan peran yang aktif dalam memfasilitasi dan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dengan memastikan adanya dukungan, pelatihan, dan sumber daya yang cukup bagi guru. Kemudian penyelarasan dengan Kebijakan Kepala sekolah juga dihadapkan pada tantangan menyelaraskan implementasi Kurikulum Merdeka dengan kebijakan pendidikan yang ada serta memastikan kesesuaian dengan standar nasional.

Seorang administrator sekolah dengan strategi dan visi yang jelas mampu melaksanakan dan mengkomunikasikan rencana kerja secara efektif. Hal ini memperjelas tujuan sekolah dan target spesifik yang perlu dicapai guru melalui kegiatan mereka. Kepala sekolah juga harus memprioritaskan kesejahteraan anggota untuk memastikan keberhasilan pencapaian program yang telah ditetapkan. Pemimpin yang memprioritaskan kesejahteraan anggotanya akan memiliki pengetahuan tentang tantangan atau hambatan yang dihadapi anggota dalam melakukan pekerjaannya, sehingga memungkinkan mereka untuk segera mengidentifikasi dan menerapkan cara untuk mengatasi hambatan tersebut.

Institusi pendidikan, kadang-kadang dikenal sebagai sekolah, adalah organisasi terstruktur yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh sekolah. Tujuan tersebut dapat tercapai jika prinsip dalam perannya sebagai pemimpin mampu menjaga kekompakan tim atau memiliki orientasi tim yang kuat. Selain itu, penting bagi Kepala Sekolah untuk mengakui dan menghargai perbedaan individu di antara anggota organisasi, yaitu para pengajar, yang memiliki sifat dan kepribadian yang beragam. Namun, penting untuk memastikan bahwa perbedaan-perbedaan ini terintegrasi secara harmonis untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif.

Implementasi Kurikulum di Indonesia merupakan upaya transformasi pendidikan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menggugah kreativitas, dan mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Reformasi kurikulum saat ini khususnya pada kurikulum Merdeka pada praktek di lapangan dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, peran kepala sekolah lah yang menjadi krusial dalam memfasilitasi dan mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Dibutuhkan manajemen yang efektif dan dukungan yang memadai untuk mengatasi tantangan administratif dan teknis, serta memotivasi guru dalam menerapkan perubahan.

Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka dari Perspektif Guru

1. Perubahan Paradigma Pembelajaran: Guru perlu beradaptasi dengan perubahan paradigma pembelajaran yang diusung oleh Kurikulum Merdeka, yang menekankan pada pembelajaran berbasis keterampilan, pemecahan masalah, dan kreativitas.
2. Penyesuaian Kurikulum: Guru dihadapkan pada tantangan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa secara individual, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan potensinya.

3. Kendala Teknis: Kendala teknis seperti kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta keterbatasan waktu dan pengetahuan dalam menerapkan pendekatan baru juga menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Strategi yang mampu mengatasi tantangan tersebut salah satunya mengadakan pelatihan dan Pengembangan Profesional dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala kepada guru dan kepala sekolah untuk memperkuat pemahaman mereka tentang konsep dan praktik Kurikulum Merdeka. Pelatihan ini harus mencakup metode pembelajaran baru, strategi penilaian yang sesuai, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran.

D. KESIMPULAN

Kepala sekolah sebagai agen mediasi bertindak efektif dalam memediasi reformasi pendidikan terhadap sikap dan kebutuhan guru. Kepala sekolah memiliki tuntutan bagaimana meningkatkan pemahaman guru terhadap reformasi Pendidikan salah satunya pada bidang kurikulum untuk dapat melalui proses Bersama dalam menjalankan reformasi pendidikan yang ada. Reformasi pendidikan hanya bisa efektif jika kebijakan diterapkan dengan baik. Untuk meningkatkan kualitas Pendidikan harus fokus pada keseimbangan tekanan eksternal dan dukungan intra-organisasi untuk perubahan tersebut.

Reformasi pendidikan di Indonesia merupakan sebuah proses penting dan penting yang harus diakui dan dihargai. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan Indonesia bersaing secara efektif dengan negara-negara berkembang lainnya dan memenuhi kewajiban hukumnya dalam menyediakan layanan berkualitas. Penulis dapat menunjukkan struktur reformasi melalui dua atribut utama: pertama, reformasi programatik, yang terlihat jelas dalam modifikasi kurikulum, dan kedua, reformasi sistematis, yang terlihat jelas dengan adanya kebijakan mengenai keuangan pendidikan dan desentralisasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Siahaan, dkk. (2021). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Etika Keadilan dan Toleransi di SMK*. Jurnal Pendidikan Al-Ishlah. Vol.13 (3).
- Dananjaya, U. (2012). *Reformasi Pendidikan*. KOMPAS.
- Helmer, BC, C. Holt, dan R. Thompson. (2015). *Komunikasi Kepala Sekolah: Membentuk Kampus Moral dan Pembelajaran Siswa*. Jurnal Forum Nasional Administrasi & Pengawasan Pendidikan 32 (2): 17–28
- Kompas. (2016). *Daya Imajinasi Siswa Lemah*. Jakarta: Kompas
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ketiga)*. Balai Pustaka
- Porter, AC, J. Murphy, E. Goldring, SN Elliott, MS Polikoff, dan H. May. (2008). *Penilaian Vanderbilt Kepemimpinan dalam Pendidikan: Pedoman Teknis 1.0*. Nashville, TN: Universitas Vanderbilt.
- Surakhmad, W. (2009). *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Kompas.
- Spillane, J., and A. W. Kenney. (2012). "School Administration in a Changing Education Sector: The U.S. Experience." *Journal of Educational Administration* 50 (5): 541–561.
- Zainuddin, M. (2008). *Reformasi Pendidikan; Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah (Pertama)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apa Kata Nadiem Tentang Reformasi Pendidikan - Website LLDIKTI Wilayah V (kemdikbud.go.id)